

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui beberapa undang-undang dimaksudkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari kemerdekaan Indonesia yang selanjutnya menjadi amanat pembangunan kepada siapa pun yang melaksanakan roda pemerintahan di era otonomi daerah sekarang ini, kebijakan pembangunan semakin di titikberatkan pada bagaimana kesejahteraan tersebut dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat hingga pelosok.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Pasal 81 undang-undang desa menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa

diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa sangat di butuhkan kerjasama yang baik antara pihak masyarakat dan aparat pemerintah, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang tertuang dalam UUD 1945 yakni masyarakat yang adil dan makmur. Di Indonesia rencana pembangunan nasional menjadi prioritas dalam pembangunan pedesaan. Hal ini di sebabkan karena kurang lebih 80% penduduk Indonesia berdiam di pedesaan. Sehingga tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan negara RI yang di ukur dalam kacamata pembangunan nasional, serta keterkaitan dengan kondisi-kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang merupakan tantangan bagi pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Selama lebih dari tiga decade, proses pembangunan di Indonesia pada umumnya dilakukan dari atas ke bawah (*top-down*) dengan mengesampingkan partisipasi kelompok-kelompok utama (termasuk didalamnya masyarakat ilmiah). Hal ini merupakan salah satu penyebab, sebagai salah satu contoh bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak pernah mendengar mengenai agenda 21 atau pembangunan berkelanjutan dan juga komitmen-komitmen Internasional yang telah di buat pemerintah (Abdoellah 2007), hal ini menunjukkan kepada kita semua

bahwa pemerintah belum memanfaatkan potensi kelompok-kelompok utama untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*ministry on environment, republic of Indonesia, 2002*). Peran kelompok utama, apalagi penduduk lokal belum diakui dan bahkan mereka justru di sisihkan dari keseluruhan proses pembangunan. Sebagian dari kita tidak pernah menghargai pengalaman penduduk lokal, yang sebenarnya dapat memberikan masukan yang berarti bagi proses pengambilan keputusan.

Namun jika kita juga melihat ke belakang bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (*bottomup*) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa/kelurahan di dengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, dimana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ke tiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat di kritisi mengandung banyak kelemahan.

Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa/kelurahan) kadang tidak di gubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai

dari musrembang desa/kelurahan hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif.

Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya (partisipatif). Padahal, sebagaimana yang telah di jelaskan diatas bahwa macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di Kabupaten Poso Kecamatan Pamona Utara Desa Sulewana bahwa peran masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlaksana dengan baik di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri musrenbang akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah di respon oleh pemerintah serta bagaimana proses pelibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Peran masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program pembangunan dalam suatu

wilayah. Peran masyarakat di perlukan karena program pemerintah yang di laksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bersama-sama dengan pemerintah memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah jalannya pelaksanaan program pembangunan.

Secara konseptual teoritik partisipasi melahirkan berbagai pendapat dari para ahli, di antaranya dari Keit Davis, Sastropoetra (2005:75) yang mengatakan bahwa: partisipasi di definisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada laporan kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Keterlibatan atau keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan partisipasi pada setiap program pembangunan dapat berupa sumbangan pemikiran atau pemberi ide-ide keterlibatan secara fisik atau tenaga, serta ikut merasakan hasil-hasil program pembangunan itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut lebih lanjut Bintoro Tjoroamidjo (1993:207) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah: keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang di lakukan pemerintah, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan secara berkeadilan.

Namun kenyataannya hal tersebut tidak nampak dalam program pembangunan di desa Sulewana, karena dalam hal pembangunan masyarakat tidak

lagi di berikan tanggung jawab untuk dapat berperan aktif dalam program-program pembangunan. Selain itu peran aktif masyarakat hanya terlihat dalam pembangunan nyata yang menyangkut pembangunan rumah ibadah (Gereja) yang merupakan swadaya masyarakat. Tidak terlihat jelas bahwa pembangunan di desa Sulewana merupakan ide/gagasan dari masyarakat. Karena masyarakat hanya sebagai pelengkap dalam pelaksanaan musrembang. Istilah yang penting hadir pada musrembang dapat uang saku, menyampaikan aspirasi ataupun tidak bukan masalah karena sekalipun mengutarakan saran tetap hanya sebagai pelengkap, itulah kenyataan yang terjadi di desa Sulewana.

Pembangunan yang terlaksana di desa Sulewana bukan lagi karena kebutuhan masyarakat tetapi lebih kepada kesepakatan golongan tertentu, sehingga peran masyarakat dalam pembangunan di desa Sulewana tidak menjadi hal yang sangat krusial. Padahal kalau melihat konsep pembangunan Nasional untuk pedesaan seharusnya segala pembangunan di desa mengutamakan saran/ide/gagasan dari masyarakat karena masyarakat lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya di desa. Sehingga peran masyarakat di desa dapat terlihat dengan jelas dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

Di satu sisi masyarakat Sulewana sendiri kurang memahami apa yang menjadi perannya dalam pembangunan di desa. Hal tersebut merupakan dampak daripada kurangnya sosialisasi pemerintah terkait dengan program pembangunan desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Di sisi lain juga masyarakat

menjadi acuh tak acuh karena selama ini merasa apapun yang menjadi aspirasi mereka seakan tidak di respon walaupun mendapatkan respon itu manfaatnya akan dirasakan setelah menunggu untuk waktu yang sangat lama. Sehingga semakin lama hal tersebut terkumulasi dan menjadikan masyarakat semakin tidak mengetahui apa peran dan manfaatnya dalam pembangunan.

Dari uraian yang di kemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso ?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di kemukakan diatas, maka tujuan penelitian dapat di kemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran masyarakat dalam pembangunan di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat yang ingin di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis di harapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat baik atau pemikiran yang positif kepada orang lain sebagai referensi yang dalam meneliti hal yang berkaitan dengan pembangunan desa untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan proses pembangunan sebagai tanggung jawabnya kepada masyarakat yang harus ikut serta dalam berpartisipasi khususnya di desa Sulewana.